

Reformasi Governansi Publik untuk Tingkatkan ‘Digital Flight’ menyongsong Indonesia Cerdas 2045

Prof. Sofian Effendi
Wakil Ketua AIPI dan Anggota AIPI-KIS

1. Indonesia: Sudah Digital Ready, tapi Belum Network Ready

Peringatan Hari Kemerdekaan ke 75 merupakan moment yang tepat bagi bagi bangsa Indonesia untuk merencanakan kemana bangsa yang memiliki kekayaan hayati dan budaya yang luar bias ini akan mampu memanfaatkan pandemic Covid-19 percepat Transformasi Digital guna Wujudkan Indonesia Cerdas 2045?. Karena itu inisiatif Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), khususnya Komisi Ilmu Sosial, mengadakan Serangkaian Diskusi Online dengan tema ‘*Transformasi Digital: Menyongsong Super Smart Society 5.0 pada Indonesia Emas 2045.*’ Diskusi Pertama pada 5 Agustus mengambil tema ‘*Disrupsi dan Perkembangan Teknologi Digital: Transformasi Infrastruktur dan Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.*’ Sesuai bidang keilmuan yang saya tekuni selama 4 abad ini saya akan gunakan kesempatan ini untuk membahas hambatan kelembagaan governansi public dalam pemanfaatan Teknologi Digital guna mewujudkan Masyarakat Cerdas 5.0 (Super Smart Society 5.0) pada saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Bangsa dan negara indonesia.

Setelah istilah Industry 4.0 dikenalkan oleh Klaus Schwab melalui bukunya *The Fourth Industrial Revolution* yang terbit pada 2016, mulai muncul think tanks di Eropah dan di Amerika Serikat, antara lain WEF yang berbasis di Geneva, Swiss, yang dikenal luas karena Pertemuan Davos yang diadakan setiap tahun dan dikunjungi oleh para pakar busines dan teknologi kelas dunia, para pemimpin perusahaan terkenal, pejabat pemerintah, dan wakil CSOs. Setiap tahun *Global Competitiveness Report* terbit dan menjadi rujukan pemerintah negara-negara di dunia dalam merencanakan pembangunan nasional. Yang terbaru adalah Portulans Institute yang berbasis Washington D.C., lembaga think tanks yang khusus mengamati kesiapan negara-negara di dunia melakukan transformasi digital atau transformasi dari kesiapan digital menuju kesiapan networking agar teknologi digital lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada Smart Society.

Seperti diuraikan dalam Network Readiness Report 2020, pada 2020 dari 134 negara di dunia baru 3 negara yaitu Swedia, Denmark, dan Singapore, dipandang sudah dinilai ‘**most future-ready society**’ yaitu Peringkat 1 Swedia dengan skor 82.75, Pringkat 2 Denmark dengan Skor 82.19, dan Singapore sebagai Peringkat 3 dengan Skor 81.39. Tiga negara tersebut sudah mempersiapkan empat pilar network dijitalnya yaitu; Technology, People, Government, dan Kontribusi pada GDP pada Ekonomi Nasional masing-masing.

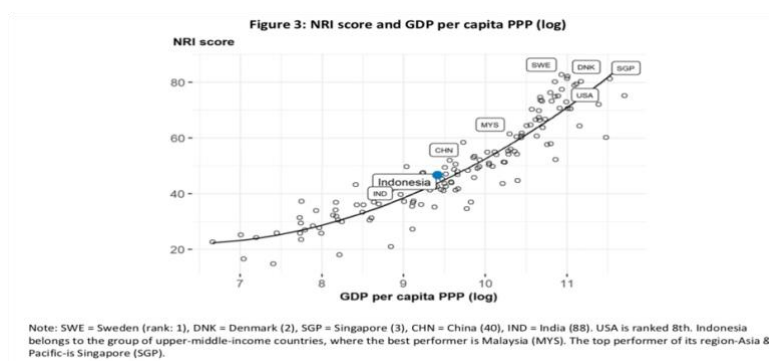


Table 1: Indonesia rankings by sub-pillar

Sub-pillar	Rank	Sub-pillar	Rank
Future Technologies	52	Inclusion	80
Governments	53	Individuals	81
Economy	57	Quality of Life	82
Trust	66	SDG Contribution	89
Access	68	Content	92
Regulation	80	Businesses	102

Sumber; NRI 2020 Indonesia. p.1

Indonesia menduduki Peringkat 73 dengan Skor 46.8 atau hampir 35 point di bawah Singapura, tapi dalam digital readiness mampu lakukan **“digital flight”** karena pemanfaatan digital readiness Indonesia dapat mengejar nega-negara yang memiliki GDP lebih tinggi. Mungkin sudah hampir 50 tahun memanfaatkan teknologi computer kalau dihitung sejak masuknya computer ke negeri ini. Namun, walaupun sudah menjadi pemain lama dalam penggunaan teknologi tersebut untuk berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor ekonomi digital terhadap GDP negeri ini belum cukup signifikan karena adanya defisit governansi publik dalam birokrasi public maupun governansi korporat Indonesia. Menurut Ron Attler (2020:1), Direktur Riset UNDP, defisit governansi terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi telah melanda hampir semua negara G-20, yang masuk kategori negara pendapatan tinggi, tetapi belum cukup berhasil dalam mempersiapkan kemampuan pemerintah dan masyarakat negara-negara tersebut mengatasi serangan pandemi Covid-19. Seperti diketahui Wabah Covid-19 bukan saja merupakan masalah Kesehatan yang luar biasa untuk menyediakan vaksinasi, obat-obatan, serta layanan rumah sakit yang diperlukan 30 jutaan orang yang terserang virus Corona.

2. Pandemi Covid-19: Peluang Digital Flight

Attler mendefinisikan defisit governansi publik sebagai kesenjangan antara kapasitas atau kemampuan governansi publik yang diperlukan untuk merumuskan pemerintah suatu negara dapat mengantisipasi masalah yang akan dihadapi, merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, menyediakan SDM, menyediakan layanan public yang cepat dan tepat, menyediakan layanan, serta memonitor pelaksanaan kegiatannya dibandingkan dengan kapasitas dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan governansi public senyatanya menjadi tantangan yang menghambat pengembangan kapasitas nasional teknologi digital yang sudah berjalan selama hampir 4 dekade.

Tergantung dari derajat deficit governansi publik yang dialami, kemampuan instansi pemerintah dit ingkat pusat dan daerah tidak mencapai sesuai dengan jumlah dan mutu layanan publik yang diberikan tidak mampu mencapai kapasitas yang diperlukan. Selisih antara kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi masalah dengan efektif dan cepat dengan kapasitas yang tersedia dan dimiliki oleh pemerintah pada saat masalah terjadi disebut deficit governansi publik. Salah satu contoh fenomena deficit governansi yang sedang terjadi saat ini adalah kekuarang mampuan pemerintah cq Kementerian Kesehatan melaksanakan tugas menyediakan vaksinasi untuk 70 persen penduduk yang berjumlah 272 juta orang yaitu 204 juta penduduk untuk menerima vaksinasi pada Maret 2021. Menteri Kesehatan pada sambutannya ~~didengan Diskusi Online yang diselenggarakan oleh ALMI~~, menjelaskan bahwa kendala Sumber; Network Readiness index 2020 Indonesia adalah terbatasnya stok vaksin yang dapat disediakan Pemerintah hanya 1,5 juta vaksin sebulan. Artinya herd immunity untuk 204 juta

penduduk memerlukan waktu hampir 14 tahun dengan kapasitas vaksinasi sebanyak 1,5 juta orang per bulan. Selain menyediakan vaksinasi pemerintah harus sediakan obat-obatan yang diperlukan untuk melindungi dan mengobati penduduk yang terpapar Covid-19, dan menjaga agar tersedia kapasitas perawatan bagi para korban serangan Covid-19 yang terus meningkat dan pernah mencapai tingkat tertinggi pada minggu minggu terakhir Juli 2021. Dalam penyediaan dan pendistribusian layanan vaksinasi, obat-obatan, dan ketersediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, penggunaan teknologi digital oleh Satgas Covid-19 dapat menjadi contoh bagi semua program lain. Teknologi digital dimanfaatkan bukan untuk layanan medis, tetapi juga untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, dan juga fasilitas yang tersedia telah digunakan di tingkat paling bawah untuk mendobrak kelesuan kegiatan ekonomi ditingkat desa.

3. Perluas dan Percepat Reformasi Governansi Publik

Setelah mengidentifikasi kendala-kendala kelembagaan yang menyebabkan defisit governansi untuk dipercepat dan tingkatkan untuk tingkatkan kapasitas SDM birokrasi public, tingkatkan penyediaan layanan publik yang lebih efisien, bermutu dan menjangkau seluruh tanah air dan semua lapisan masyarakat, pada Bagian Ketiga akan dibahas beberapa strategi dan arah kebijakan untuk menghilangkan defisit governansi public dalam percepatan pemanfaatan teknologi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan layanan publik, antara lain mempercepat pelaksanaan pemerintahan elektronik atau e-Government yang terasa semakin kurang bersemangat pelaksanaannya dalam membangun potensi ekonomi bangsa, Work from Home, School from Home, dan meningkatkan media Sosial untuk meningkatkan Usaha Mikro, dan pemanfaatan jaringan media sosial untuk pemantapan ideologi negara, dan persatuan dan kesatuan bangsa pada masyarakat majemuk.

Laporan World Economic Forum 2019-2020 sangat perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia karena Laporan ini menunjukkan penurunan daya saing sebesar 5 tingkat, dari peringkat 45 dari 137 negara pada 2018 menjadi peringkat 50 dari 141 negara pada 2019. Di antara anggota ASEAN, Indek Daya Saing Indonesia 2019 hanya lebih tinggi dari Filipina yang berada di peringkat 64, Vietnam, di peringkat 67, Muangthai di peringkat 40, dan Malaysia di peringkat 27. Satu-satunya negara ASEAN yang menduduki posisi "frontier" dalam kapasitas mempertahankan pertumbuhan tinggi ekonomi dan inklusif, dan sustainable development adalah Singapura yang walaupun pada 2019 hanya naik setingkat, tetapi berhasil menyingkirkan Amerika Serikat menjadi ekonomi berdaya saing tertinggi di dunia.

Menurut WCR 2008, KK Jilid 1 awalnya cukup berhasil naikan daya saing global Indonesia mencapai peringkat 36 dari 137 negara, dan bahkan menyalib Jepang dengan program kerja untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur, meningkatkan kinerja pemerintah, memperbaiki dinamisme bisnis. Tapi kemudian terjadi trend menurun karena daya saing global Indonesia turun 9 tingkat menjadi peringkat 45 dari 140 negara pada 2018, dan turun lagi menjadi 50 dari 141 negeri pada 2019.

Membaiknya kinerja Reformasi Birokrasi pada masa Kabinet Kerja Jilid Satu secara empiris terlihat dari Indek Efektivitas Pemerintah yang meloncat sebesar 26 tingkat, dari Posisi 121 pada 2015 menjadi Posisi 95 pada 2017, dengan Skor IEP 54,8 pada skala 0-100. Artinya dengan Skor IEP tersebut, kapasitas ASN Indonesia telah berhasil mentransformasi dirinya menjadi LMIC atau bangsa yang berpenghasilan menengah bawah, sekelas dengan Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Untuk menjadi UMIC atau negara penghasilan menengah atas dengan PDB per kapita antara \$ 4.045 - \$ 12.353, Indonesia harus bangun Aparatur Negara yang setingkat dengan negara-negara maju Asia Tenggara yang rata-rata memiliki skor IEP 2019 74-75 pada skala 0-100. Program Reformasi Birokrasi yang kurang tepat sasaran mungkin baru mencapai peringkat Aparatur Negara tersebut baru kita capai pada 2030 yang

mampu mendorong Daya Saing Global yang semakin kompetitif. Keberhasilan Singapura menjadi “*frontier*” ekonomi berdaya saing tinggi karena telah berhasil membangun *the best public service in the world* dengan skor 100 pada skala 0-100 pada Government Effectiveness Index selama 6 tahun berturut-turut.

Waktu mengumumkan Program Kerja Kabinet Kerja Jilid 2, Presiden menyampaikan Program Reformasi Birokrasi pada 5 tahun ke depan akan fokus pada: (a) peningkatan mutu dan kapasitas Aparatur Sipil Negara; (b) Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi; (c) Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan Efisien; (d) Percepatan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik; dan (e) Reformasi Pelayanan Publik.

Program Reformasi Birokrasi yang diumumkan Pemerintah Indonesia cukup relevant dengan 11 Pilar Daya Saing Nasional belum mencapai kedalaman yang telah dicapai oleh negara frontier di dunia, karena dalam implementasi kegiatan dan program cukup banyak keputusan Pemerintah yang justru bertentangan dengan tujuan penguatan 12 pilar pendukung daya saing mau pun komponen Efektivitas Pemerintah.



Untuk menuju ke tujuan tersebut Program Reformasi Birokrasi perlu tingkatkan konsistensi dan relevansi programnya dengan 12 Pilar Global Competitiveness dan pilar utama Global Competitiveness¹. Program Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan selama 50 tahun harus “bongkar mesin” agar memiliki kekuatan untuk mentransformasi Governansi public Indonesia. Aparatur Negara kita dengan memperkuat program pemberantasan korupsi yang mulai terasa loyo sejak akhir KK Jilid 1, perkuat stabilitas politik dan pemerintahan negara, dan perbaiki sistem perencanaan pembangunan yang kurang bervisi jangka Panjang. Evaluasi Global Competitiveness oleh World Economic Forum yang berbasis di Swiss secara empiris menunjukkan di 141 negara di menghasilkan 91% GDP Dunia ada Sepuluh negara frontier dalam daya saing global adalah ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi tapi inklusif, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia tergolong sebagai ekonomi yang berdaya saing global moderat karena kebijakan-kebijakan Pemerintah dirumuskan dan dijalankan oleh Aparatur Negara sedang dalam transisi (Transitional Public Service) berhasil menjadikan negeri ini ekonomi pertumbuhan sedang yang didorong oleh industri berteknologi menengah dan tenaga kerja melimpah, pasar yang cukup besar dengan pendapatan lebih tinggi, perbaikan kinerja Aparatur Negara, dan perdagangan online yang berkembang pesat yang menjadi by product dari pandemic Covid-19.

¹ Kelembagaan (P-1), ICT Adoption (P-3), Skills (P-6), Business Dynamism (P-11), dan Innovation Capabilities (P-12)

Pada jangka Panjang, paling tidak sampai 2045, kalau Pemerintah Indonesia memang serius menjadikan Indonesia ekonomi pendapatan tinggi yang inklusif, dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah harus kerja keras dan menjadikan beberapa pilar daya saing khususnya kesehatan publik, angkatan kerja lebih berketrampilan, memperluas penggunaan ICT, dan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi dalam industrialisasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu Aparatur Negara Terbuka dan Dinamis (*Open and Dynamic Public Service*) yang mampu memperkuat 12 pilar kokoh untuk menjadi bangsa berdaya saing tinggi.

4. Dari Reformasi Birokrasi Menuju Reformasi Governansi Publik

Pada 2019 kekuatan SDM ASN Indonesia terdiri dari 4,185,503 PNS plus lebih dari 2 juta pegawai honorer. Dengan jumlah pegawai ASN sebesar 6,2 juta untuk melayani 267 juta penduduk, Rasio Peg ASN/Penduduk adalah 2,36 persen. Idealnya Rasio Peg ASN/Penduduk 2% atau 5,2-5,3 persen. Artinya pada saat ini Indonesia kelebihan hampir 1 juta pegawai. Secara umum mutu SDM ASN Indonesia tertinggal dari negara-negara maju ASEAN. Kondisi SDM ASN bertambah parah karena adanya 2 juta pegawai honorer, termasuk 776.218 guru honorer dengan kualifikasi rendah terpaksa diangkat oleh dinas Pendidikan daerah untuk mengisi kekosongan hampir dua juta jabatan guru di sekolah negeri dan swasta.

Skor IEP 54,8 dalam skala 0 sampai 100 mengindikasikan mutu SDM ASN Indonesia masih tertinggal dari negara maju ASEAN. Untuk mengurangi gap mutu yang cukup lebar ini Indonesia sejak tahun 2017 telah menerapkan sistem seleksi CPNS online. Hasilnya sangat positif terlihat masuknya 6000 CPNS lebih lulusan PT papan atas, suatu kemajuan karena selama ini CPNS slalu didominasi oleh lulusan SLTA.

Kekuatan SDM ASN yang besar merupakan modal dasar untuk menyukseskan program kerja Pemerintah pada 2020-2024 akan berjalan cepat dan optimal melalui optimalisasi peran Presiden sebagai pemimpin tertinggi pegawai ASN sebagaimana diamanatkan oleh UU No 5/2014. Untuk itu melaksanakan peran sebagai pimpinan dalam pembinaan profesi dan SDM ASN tersebut di negara-negara Asia Tenggara membentuk otoritas independent pengelolaan SDM ASN dengan menggabungkan beberapa instansi yang bertugas mengelola urusan SDM. Kombinasi pembentukan otoritas independent plus penghapusan fungsi pejabat politik sebagai PPK terbukti dapat mengendalikan praktek KKN dan transaksi jabatan di negara tersebut.

Program Reformasi Reformasi yang direncanakan Kabinet Kerja Jilid 2 harus dirancang untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang terbuka dan dinamis (*open and dynamic governance*), bukan hanya birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan terbuka dan dinamis tersebut, kebijakan penertiban kelembagaan pemerintahan dengan menganulir 98 LNS dapat menjadi "boomerang" pada pembangunan kelembagaan dinamis yang terbuka. Yang tak kalah pentingnya adalah bentuk kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang bertambah guna melaksanakan tugas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, melaksanakan pembangunan inklusif dan mempertahankan sustainability kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan kelembagaan pemerintahan yang dapat menyalurkan kepentingan aktor pemerintahan yang semakin banyak dan majemuk, serta yang memungkinkan untuk mengantisipasi dan merespons dengan cepat dan tepat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis. inkonsistensi kebijakan pemerintah merupakan salah satu factor kelembagaan yang menyebabkan turunnya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index 4.0.

Karena anggaran yang disediakan Pemerintah rendah untuk pelatihan pegawai ASN, secara umum mutu tenaga kerja ASN Indonesia jauh tertinggal dari negara anggota ASEAN.

Sementara kebijakan Pemerintah mengkorvensi pekerjaan pegawai ASN dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional, yang jumlahnya lebih kurang 440.000 posisi kalau tidak berdasar peta yang jelas dan pasti tentang jumlah dan jenis posisi perkerjaan dalam Aparatur Negara Republik Indonesia, dapat menimbulkan instabilitas yang akan menurunkan kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia.

5. Akselerasi Reformasi Governansi Publik

Pada 2019 Pemerintah telah akselerasi Efektivitas Pemerintah sebesar 20 tingkat untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara Penghasilan Menengah Tinggi. Agar pada 2035 terbangun ASN yang berkemampuan menggerakkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa berpenghasilanUS\$ 12.535, Program Reformasi Birokrasi tidak bisa bersemangat rutinitas seperti terjadi pada Priode 1 dan tahun pertama Priode 2 Kabinet Kerja, tetap harus diarahkan untuk membangun kelembagaan pemerintahan negara seperti yang diinventarisasi oleh the Global Competitiveness Index 4.0, yaitu:

Global Competitiveness Index 4.0.

Komponen Pilar 1: Masalah Kelembagaan Birokrasi Publik

1. *Insufficient Government Bureaucracy*
2. *Corruption*
3. *Policy Instability*
4. *Poor Work Ethics*
5. *Inadequately trained labour*
6. *Insufficient capacity to innovate*
7. *Poor public health*

Secara nasional mutu layanan publik yang dicapai Indonesia, dalam layanan pendidikan, perizinan, keimigrasian, dan izin pembukaan usaha, sudah di jalur hijau muda, dengan skor 6. Pandemi Covid-19 menunjukkan kepada kita bahwa dalam bidang Kesehatan perlu perubahan mendasar. Tujuan layanan Kesehatan perlu dikoreksi dari kuratif ke non-kuratif dan menekankan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Penggunaan sistem online dalam perizinan dan layanan publik seperti BPJS, SIM, KTP, pendaftaran dan pembayaran langganan pajak, izin usaha, diperkirakan akan dapat meningkatkan komponen layanan publik, dan selanjutnya akan mampu menaikkan IEP. Skor Mutu SDM ASN apabila pengangkatan 2 juta pegawai honorer dapat diselesaikan dalam 2 tahun, dimulai segera dengan pengangkatan 51.000 pegawai honorer yang telah di evaluasi. Perluasan penerapan SIJAPTI dan SIPINTER yang dapat mencakup 34 kementerian, 34 provinsi, dan 514 kabupaten dan kota, akan sangat meningkatkan skor indek mutu SDM ASN.

Faktor pengungkit ketiga, adalah menghilangkan intervensi politik dalam manajemen SDM ASN. Di banyak negara yang mencapai skor tinggi dalam factor ini intervensi politik di netralisir dengan menghapus kewenangan pejabat politik dalam penunjukan pejabat tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Penghapusan Ps 35 Ayat (2) UU 5 tahun 2017 dan menetapkan Sesjen, Sesmen, dan Sestama sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, akan mentralisir intervensi politik terhadap mutu pelaksanaan sistim meritokrasi dalam SDM ASN.

Mutu formulasi dan implementasi regulasi pemerintah otomatis akan meningkat kalau Kabinet Kerja Jilid 2 menjadikan 2020 sebagai tahun untuk menyelesaikan tunggakan regulasi pelaksanaan UU yang tertunda, dan merevisi atau mencabut UU dan ribuan peraturan daerah yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan tingkat nasional yang dikeluarkan pada masa kerja KK Jilid 1 yang kalau tidak dilaksanakan dengan hati dapat menimbulkan instabilitas baru dalam pemerintahan.

Global Competitiveness 4.0 Report dapat digunakan oleh pemerintah di berbagai negara kalau dipakai sebagai kompas untuk memandu reformasi birokrasi dalam mencapai tujuan menjadi *“open and dynamic public service”* yang mampu mewujudkan daya saing tertinggi sehingga diakui sebagai *“frontier”* diantara ekonomi tingkat pertumbuhan tinggi, inklusif, dan pembangunan berkelanjutan. Dari 141 ekonomi yang dievaluasi oleh WEF pada 2019 dan dilaporkan pada 2020, Indonesia memiliki daya saing moderate dengan skor total 65 dalam Global Competitiveness Index 4.0 tahun 2019. Dari 11 pilar Daya Saing yang mencakup 4 komponen GCI 4.0, Enabling Environment terdiri dari 4 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, Adopsi ICT, dan stabilitas makro ekonomi. Komponen 2, Human Capital terdiri dari 2 pilar yaitu Kesehatan dan Ketrampilan. Komponen 3 Market memiliki 4 pilar yaitu Product Market, Labor Market, Financial System, dan Market Size. Komponen 4 Innovation Ecosystem terdiri dari 2 pilar yaitu Business Dynamism dan Innovation Capacity.

Infografis di hal 5 daya saing global Indonesia terutama didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang cukup tinggi hamper sekelas dengan ekonomi maju dunia dengan skor 90 dari 141 negara, pasar besar dan daya beli sedang meningkat seperti terlihat dari dinamisme bisnis yang mencapai skor 70, Kesehatan yang mendapat skor 71, infrastruktur yang mencapai skor 68. Indonesia sangat terkendala oleh Pilar 12 yaitu Innovation Ecosystem yang buruk dengan skor hanya 38 yang menunjukkan masih rendahnya upaya pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang baik.

Yogyakarta, 3 Agustus 2021

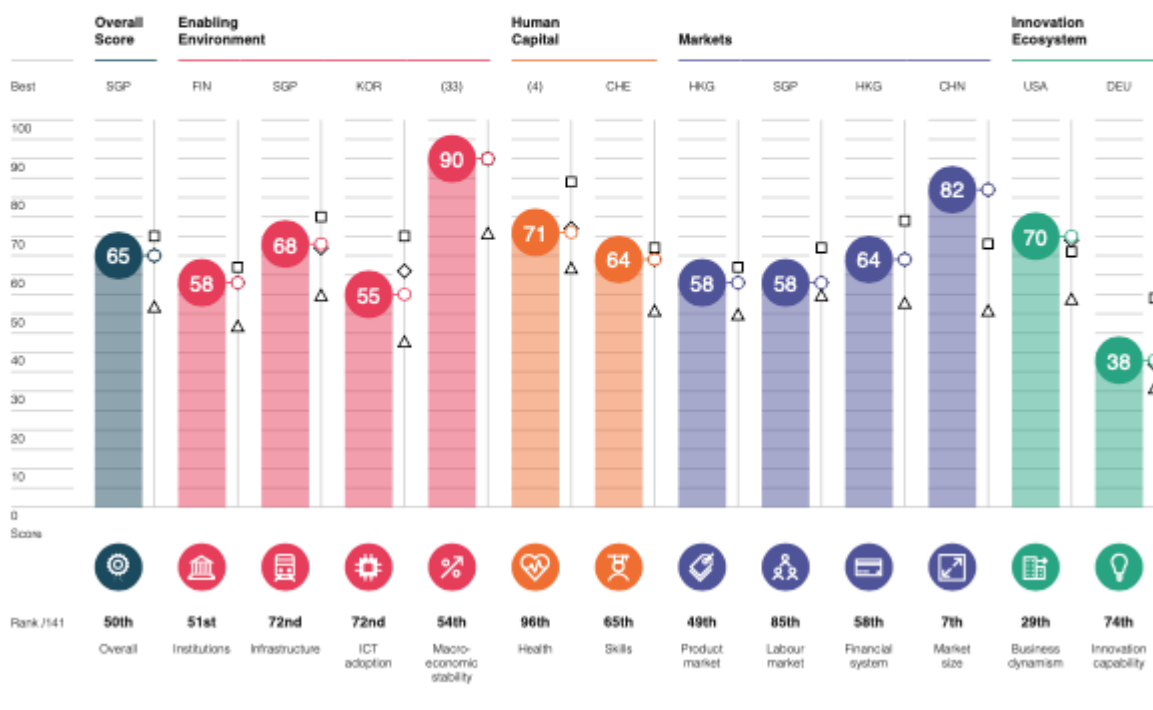
Indonesia

50th /141

Global Competitiveness Index 4.0 2019 edition

Rank in 2018 edition: 45th/140

Performance Overview Key ◊ Previous edition ▲ Lower-middle-income group average □ East Asia and Pacific average
2019



Executive Summary **World Competitiveness Indicators** menyimpulkan sebagai berikut: *“As monetary policies begin to run out of steam, it is crucial for economies **to rely on fiscal policy, structural reforms and public incentives to allocate more resources towards the full range of factors of productivity to fully leverage the new opportunities provided by the Fourth Industrial Revolution.**”* Rasanya kebijakan dalam tiga area tersebut baru mulai disentuh Pemerintah Indonesia, diawali dengan RUU Cipta Kerja yang keterbatasan waktu menimbulkan heboh karena prosesnya kurang terbuka dan kurang sosialisasi. Pengalaman penerimaan public yang hingar binger terhadap RUU Cipta Kerja jangan menyurutkan niat Pemerintah untuk selalu inovatif dalam mencari kebijakan-kebijakan non-moneter untuk jadikan Indonesia “frontier” dalam daya saing global.

Jakarta, 2 Agustus 2021

